**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PARIA KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO**

**SKRIPSI**



**BASO ARIFUDDIN**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2014**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar **Nomor 359/UN36.6/PL/2014,** tanggal 22 Januari 2014 untuk membimbing Saudara :

Nama : **BASO ARIFUDDIN**

NIM : 106104082

Jurusan : PPKn/ S1

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul Skripsi :**Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo**

 Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa, diteliti, dan dipertahankan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada hari Senin, 30 Juni 2014 dan dinyatakan lulus.

 Makassar, Juli 2014

Menyetujui:

 Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Mustari, M. Hum Prof. Dr. Hj. Andi Kasmawati, M. Hum NIP. 19651231 199003 1 015 NIP. 19651224 199003 2 003**

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Skripsi diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan **SK Dekan No. 2779/UN36.6/KM/2014** pada tanggal 24 Juni 2014 untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pada hari Senin 30 Juni 2014.

 Disahkan Oleh :

 Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

 **Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum**

 **NIP. 19671231 199303 1 016**

**Panitia Penguji :**

1. Ketua : **Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum** (…..……….…......)
2. Sekretaris : **Lukman Ilham, S. Pd, M. Pd** (…..……….……..)
3. Pembimbing I : **Dr. Mustari, M. Hum** (.....……….…...…)
4. Pembimbing II : **Prof. Dr. Hj.Andi Kasmawati, M. Hum**(…..……….……..)
5. Penguji I : **Drs. Firman Umar, M. Hum** (.…..……….…….)
6. Penguji II : **Drs. Muhammad Akbal, M. Hum** (…..……….……..)

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : **BASO ARIFUDDIN**

NIM : 106104082

Tempat/ Tgl. Lahir : Paria, 9 November 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jurusan : PPKn

Program Studi : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi :**Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo**

Dengan dosen pembimbing masing-masing :

1. **Dr. Mustari, M. Hum**
2. **Prof. Dr. Hj. Andi Kasmawati, M. Hum**

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Juli 2014

|  |  |
| --- | --- |
| Diketahui Oleh :Ketua Jurusan PPKn**Dr. Mustari, M. Hum****NIP. 19651231 199003 1 015** |  Yang Membuat Pernyataan**Baso Arifuddin** **NIM. 106104082** |
|  |  |

**MOTTO**

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)

Sesuatu yang dianggap sulit sebelumnya, akan terasa mudah jika dikerjakan dengan penuh semangat dan pantang putus asa. (Baso Arifuddin)

**PERSEMBAHAN**

**Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:**

Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang senantiasa memberikan doa, nasehat, semangat, dan dukungan, cinta dan kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya.

Serta saudara-saudariku yang selalu ada untukku, menjadi motivator dan penyemangatku.

**ABSTRAK**

**BASO ARIFUDDIN. 2014.** Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. 2) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana populasinya adalah semua wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang bertempat tinggal di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang berjumlah 684 wajib pajak. Sedangkan sampelnya adalah 10 % dari jumlah populasi yaitu 68 wajib pajak yang diambil dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana (*simple random sampling*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis persentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1) Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo berada dalam kategori rendah dengan persentase 55 %, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 2) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah hanya sebatas rutin mengingatkan masyarakat untuk segera membayar hutang pajaknya serta memberikan teguran langsung secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang menunggak hutang pajaknya. Sejauh ini pemerintah tidak pernah menjatuhkan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak patuh, dan juga belum pernah diadakan penyuluhan hukum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

 **KATA PENGANTAR**

****

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Taala, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul, **“Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akhirnya dapat dirampungkan sesuai waktu yang telah ditargetkan. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan atas junjungan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wassallam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kendala dan kesulitan, baik dalam proses pengumpulan bahan pustaka, proses penelitian, maupun dalam proses penyusunannya. Namun karena begitu banyak doa, dukungan, dan perhatian yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, maka segala hambatan yang ada dapat terlewati dan dihadapi dengan suka maupun duka. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Arismunandar, M. Pd selaku Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan izin dan persetujuan mengadakan penelitian.
3. Bapak Dr. Mustari, M. Hum dan Lukman Ilham, S. Pd, M. Pd selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganengaraan .
4. Bapak Dr. Mustari, M. Hum dan Ibu Prof. Dr. Hj. Andi Kasmawati, M. Hum, sebagai dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikiran serta meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis, dan memberikan dukungan serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Firman Umar, M. Hum dan Drs. Muhammad Akbal, M. Hum, sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan masukan, koreksi, serta arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial, khususnya Jurusan PPKn, beserta Staf yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial almamater orange yang tercinta.
7. Bapak Baharuddin, S selaku Lurah Paria beserta Staf yang telah berkenan menerima dan membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Bapak Andi Usman dan Drs. Nuralang selaku penagih hutang Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Paria yang telah berkenan untuk memberikan informasi dan keterangan terkait permasalahan yang diteliti.
9. Seluruh masyarakat Kelurahan Paria, khususnya para responden yang telah berkenan mengisi angket penelitian.
10. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Baso Arifai dan Ibunda Besse Daramatasia yang selama ini telah mengorbankan begitu banyak hal demi kepentingan penulis selama menempuh pendidikan. Atas segala jasa, doa dan nasehatnya penulis sampaikan sembah sujud dan terima kasih.
11. Saudara-saudariku tercinta, Baso Ridwan, S. Sos dan Besse Ratna Sari beserta segenap keluarga besar dan kerabat yang selama ini memberikan doa dan motivasi serta bantuan moril dan materi yang tiada hentinya kepada penulis.
12. Sahabatku, (Aswin, Darsi, St. Fatima, Nurwahidah, dan Masita), terima kasih atas segala bantuan, semangat dan motivasinya selama ini, kalian adalah teman terbaikku akan kujadikan sebagai kenangan yang berharga yang tak akan terlupakan sampai kapanpun. Semoga kenangan dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di bangku kuliah tak lekang oleh waktu, hari ini, esok, dan selamanya.
13. Teman seperjuanganku, (Muh. Firman, Muh. Aslansyah, Mufliha Haerati, Mirnawati, dan Zurahma).
14. Untuk saudara-saudariku senasib sepenanggungan di Pondok Kembar, (Dedy, Irham, Deny, Kyky, Wanti, Nelly, Maryam, Sri, dan Eky), terima kasih atas bantuan dan motivasinya, serta jalinan tali persaudaraan dan persahabatan yang selama ini terjalin, sehingga menunjang rasa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta seluruh teman-teman “PPKn Angkatan 2010” yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan motivasinya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan dan menghargai kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi salah satu bahan informasi dan pengetahuan bagi kita semua serta mendapat ridho Allah Subhana Wa Taala, Aamiin.

 Makassar, 17 April 2014

 **Penulis**

 **Baso Arifuddin**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Tujuan Penelitian 6
4. Manfaat Hasil Penelitian 6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka** 8
2. Kepatuhan Hukum 8
3. Pajak 13
4. Pajak Bumi dan Bangunan 28
5. **Kerangka Pikir** 34

Skema Kerangka Pikir 36

**BAB III METODE PENELITIAN**

1. Variabel dan Desain Penelitian 37
2. Definisi Operasional Variabel 37
3. Populasi dan Sampel 38
4. Teknik Pengumpulan Data 40
5. Teknik Analisis Data 42

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian** 43
2. Kondisi Geografis 43
3. Struktur Organisasi Kelurahan Paria 44
4. Kondisi Demografis 45
5. Potensi dan Sarana Sosial 47
6. **Deskripsi Hasil Penelitian** 48
7. Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat dari Segi *Compliance*

dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 49

1. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi

dan Bangunan 72

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan 79
2. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

**TABEL JUDUL HALAMAN**

Tabel 1. Keadaan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Paria 39

Tabel 2. Sampel Penelitian 40

Tabel 3. Luas Wilayah Kelurahan Paria 43

Tabel 4. Keadaan Penduduk Kelurahan Paria 45

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Paria 46

Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Paria 47

Tabel 7. Tanggapan Responden Terhadap Adanya Undang-Undang

 Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas

 Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1985 Tentang

 Pajak Bumi dan Bangunan 50

Tabel 8. Tanggapan Responden Terhadap Sanksi atas Pelanggaran

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan 53

Tabel 9. Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Dimiliki

oleh Responden 54

Tabel 10. Kesediaan Responden Menerima Sanksi Jika Masih Ada

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Belum Didaftarkan 55

Tabel 11. Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Hutang Pajak Bumi

dan Bangunan yang Harus Dibayar Setiap Tahunnya 56

Tabel 12. Jangka Waktu Responden Membayar Pajak Setelah Menerima

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 58

Tabel 13. Data Mengenai Keterlambatan Responden Membayar Pajak

Bumi dan Bangunan 59

Tabel 14. Pembayaran Denda Responden Jika Terlambat Membayar

Hutang Pajak Bumi dan Bangunan 61

Tabel 15. Data Responden yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan

 Bangunan dalam Satu Tahun Pajak 62

Tabel 16. Alasan Keterlambatan Responden dalam Membayar Pajak

 Bumi dan Bangunan 63

Tabel 17. Alasan Responden Tidak Membayar Pajak Bumi dan

 Bangunan dalam Satu Tahun Pajak 64

Tabel 18. Rata-rata Nilai Berdasarkan Pembobotan Opsi Jawaban Tiap

 Item Pertanyaan dalam Angket Tentang Kepatuhan Hukum

 *Compliance* Masyarakat 66

Tabel 19. Pengetahuan Responden Mengenai Tata Cara Pendaftaran

 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 67

Tabel 20. Pengetahuan Responden Tentang Fungsi Pajak 69

Tabel 21. Pengetahuan Responden Tentang Tenggang/Batas Waktu

 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Setelah Menerima

 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 70

Tabel 22. Pengetahuan Responden Tentang Sanksi atas Pelanggaran

 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan 70

Tabel 23. Rata-Rata Nilai Berdasarkan Pembobotan Opsi Jawaban

 Tiap Item Pertanyaan dalam Angket Tentang Pengetahuan

 Hukum Masyarakat 72

Tabel 24. Tanggapan Responden Mengenai Intensitas Pemerintah dalam

 Mengadakan Penyuluhan Hukum Tentang Pajak Bumi dan

 Bangunan 73

Tabel 25. Intensitas Responden dalam Mengikuti Penyuluhan Hukum

 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 74

Tabel 26. Tanggapan Responden Mengenai Intensitas Pemerintah dalam

 Mengingatkan Waktu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

 kepada Masyarakat 75

Tabel 27. Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Sanksi oleh

 Pemerintah kepada Pihak yang Tidak Patuh Membayar Pajak Bumi

 dan Bangunan 77

**DAFTAR GAMBAR**

**GAMBAR JUDUL HALAMAN**

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 36

Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan Paria 44

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Usulan Judul Skripsi
2. Pengesahan Judul dan Pembimbing
3. Undangan Ujian/Seminar
4. SK Panitia Ujian Skripsi
5. Angket Penelitian
6. Pedoman Wawancara
7. Surat Izin Pra Penelitian
8. Surat Izin Penelitian dari Fakultas
9. Surat Izin Penelitian dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD)
10. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo
11. Surat Keterangan Telah Melaksankan Penelitian
12. Daftar Nama-Nama Responden
13. Dokumentasi Proses Penelitian
14. Riwayat Hidup Penulis

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indikator tercapainya cita-cita suatu negara adalah ketika ia mampu menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum, yang secara konstitusional diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yakni “...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Konsep kesejahteraan dalam hal ini bahwa negara mengupayakan semua rakyatnya untuk dapat menikmati kehidupan yang layak tanpa diskriminasi.

Tingkat kesejahteraan dalam suatu negara salah satunya dapat ditandai dengan kemampuan negara dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang sifatnya merata dan berkelanjutan. Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional secara merata dan berkelanjutan, maka dibutuhkan sumber dana yang sifatnya berkelanjutan pula yang nantinya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional maupun pengeluaran negara lainnya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan negara. Karena itu pajak memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Demikian pentingnya pajak bagi negara, maka pemungutannya secara konstitusional didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 A, bahwa “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pada hakekatnya pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis. Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Negara memungut pajak yang bersifat memaksa bagi rakyatnya, tetapi pemungutan pajak tersebut membawa konsekuensi bahwa negara mutlak harus berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak bukan saja kewajiban belaka, melainkan juga adalah hak dari pembayar pajak (wajib pajak). Hak yang dimaksudkan disini adalah dapat tercipta kesejahteraan dari hasil pemungutan tersebut yang nantinya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketentuan akan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan dari hasil pemungutan pajak tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar dan berpengaruh untuk pemenuhan dana atau kas negara karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial. Namun meskipun pajak tersebut merupakan Pajak Negara atau Pajak Pusat, tapi sebagian besar dari penerimaannya adalah bagian Pemerintah Daerah.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kewenangan bagi masing-masing daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka secara otomatis daerah otonom berwenang dan berkewajiban untuk mengatur, mengurus, serta menyelenggarakan kepentingan rumah tangganya sendiri secara nyata dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah otonomi pada dasarnya ditentukan oleh tersedianya dana yang cukup memadai, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta tergantung pula pada pengelolaan pendapatan daerah yang diperoleh.

Dengan adanya dasar hukum tentang pemungutan pajak di atas, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, maka secara otomatis menimbulkan harapan besar agar masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan hukumnya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun pemungutan pajak telah diatur sedemikian tegas dalam Undang-Undang tanpa adanya kesadaran dari masyarakat untuk meningkatkan kepatuhannya maka apa yang dicita-citakan akan sulit bahkan tidak bisa tercapai.

Berkaitan dengan pentingya pembayaran pajak, maka sesuatu hal yang mutlak untuk diupayakan adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat untuk membayar pajak demi terselenggaranya pembangunan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah otonom yang mempunyai wewenang untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang akan digunakan untuk pembiayaan aktifitas pemerintahan dan pembangunan daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan pengamatan awal penulis pada tanggal 17 Februari 2013 di salah satu kelurahan, yaitu Kelurahan Paria yang berada di Kecamatan Majauleng, yang berpenduduk 2.601 jiwa, terdiri atas 684 kepala keluarga serta 684 wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang tersebar di dua Lingkungan yaitu Lingkungan Tengnga dan Lingkungan Lompo. Daerah tersebut mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani yang memiliki lahan serta mendapatkan keuntungan dari hasil bumi. Namun meskipun demikian, dalam hal kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum bisa dikatakan maksimal karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam penagihan dan pembayarannya, dimana masih ada wajib pajak yang tidak menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak, seperti masih adanya keterlambatan bahkan ada yang masih belum melakukan kewajibannya tersebut. Pemerintah setempat kerap kali mengingatkan masyarakat untuk senantiasa melunasi utang pajaknya tepat waktu, namun upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka isu yang muncul adalah belum maksimalnya kepatuhan hukum masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Berangkat dari isu tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka akan diangkat beberapa rumusan masalah sebagai fokus penelitian dan akan dikaji lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.
3. **Manfaat Hasil Penelitian**

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Negeri Makassar

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi penambahan referensi atau bahan rujukan untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang yang diteliti.

1. Bagi Instansi Terkait

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi mengenai tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta menjadi masukan untuk lebih meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo khususnya bagi pemerintah dan masyarakatnya sendiri

1. Bagi Peneliti

Sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta sebagai salah satu upaya untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah terutama pada bidang yang diteliti.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Kepatuhan Hukum**
3. **Definisi Kepatuhan Hukum**

Menurut M. Sofyan Lubis bahwa kepatuhan hukum pada hakekatnya adalah kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.[[1]](#footnote-2)

Kemudian Suwondo menyatakan bahwa:

Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis, kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan, dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak, oleh karena itu dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok.[[2]](#footnote-3)

Pendapat di atas menyatakan bahwa orang akan patuh pada hukum apabila ia sadar bahwa hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia baik perorangan maupun kelompok. Jadi intinya adalah kepatuhan itu bermula dari kesadaran seseorang akan pentingnya hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:

Kepatuhan hukum apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, perasaan keadilan masyarakat, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat, jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak.[[3]](#footnote-4)

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa masalah kepatuhan hukum secara yuridis tradisional akan tumbuh dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat karena perilaku seseorang dibentuk oleh peraturan hukum, jadi secara otomatis dengan sendirinya hukum tersebut akan dipatuhi oleh masyarakat.

Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, yakni hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhinya.[[4]](#footnote-5)

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut.[[5]](#footnote-6)

Berdasarkan pendapat di atas, maka kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai suatu sikap dan reaksi yang diawali dengan kesadaran yang diaplikasikan sebagai kesetiaan atau ketaatan seseorang terhadap segala aturan hukum yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui tindakan nyata.

1. **Indikator Kepatuhan Hukum**

Menurut Leopold Pospisil dalam buku *“Anthropology of Law, Comparative Theory”* (Ronny Hadityo Soemitro, 1980), masalah kepatuhan terhadap hukum dapat dikembalikan pada beberapa tolak ukur sebagai berikut:

1. Persetujuan (*Compliance*), yaitu penerimaaan secara terbuka terhadap suatu aturan hukum dan mematuhinya karena adanya ketakutan terhadap sanksi atau sebagai suatu usaha menghindari kemungkinan hukuman.
2. Identifikasi (*Identification*), yaitu penerimaan sesuatu peraturan bukan karena nilai intrisiknya dan daya tariknya akan tetapi karena keinginan orang untuk mempertahankan keanggotaan di dalam kelompok atau untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sumber kekuatannya adalah daya tarik dari hubungan yang dinikmati orang-orang atau tokoh-tokoh dari kelompok itu, sedangkan persesuaian dengan peraturan akan tergantung pada menonjolnya hubungan-hubungan ini.
3. Internalisasi (*Internalization*), yaitu penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan atau tingkah laku karena berpendapat bahwa isinya secara intrinsik memberikan imbalan.
4. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat**

Menurut Utrecht, bahwa orang mematuhi hukum karena bermacam-macam sebab antara lain:

1. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakekat dan tujuan hukum.
2. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
3. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
4. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
5. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.[[6]](#footnote-7)

Kemudian hal yang senada juga dikemukakan oleh Zainuddin Ali bahwa seorang warga negara mematuhi hukum karena berbagai sebab yaitu:

1. Tahu akan tujuan dan manfaat dari adanya hukum.
2. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar.
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
4. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
5. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
6. Kepentingannya terjamin.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa seseorang mematuhi hukum karena beberapa hal, dan hal yang paling utama diantaranya adalah karena masyarakat sadar bahwa dengan mematuhi hukum akan terjadi ketentraman, dan mereka merasa membutuhkan hukum dalam kehidupannya. Selain itu masyarakat juga menyadari bahwa melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas.

1. **Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat**

Upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangatlah mutlak untuk dilakukan oleh pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum, karena masyarakat tidak akan serta merta mematuhi hukum begitu saja tanpa adanya tindakan dari pmerintah untuk membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap hukum.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:

Peningkatan kepatuhan hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat, pajak, dan seterusnya. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.[[8]](#footnote-9)

Melanjutkan pendapat di atas, maka Zainuddin Ali menyatakan:

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Yang disebutkan terakhir ini harus diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum. Jangan sampai terjadi petugas-petugas itulah yang justru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, dengan jalan menakut-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam hal meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, upaya yang paling utama untuk ditempuh adalah melalui penyuluhan dan penerangan hukum oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menerangkan tentang suatu aturan hukum tertentu kepada masyarakat agar mereka bisa tahu dan paham akan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut. Karena tanpa adanya penyuluhan dan penerangan, masyarakat tidak semuanya akan mengerti hakekat dari adanya aturan hukum, dan akhirnya mereka tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

1. **Pajak**
2. **Definisi Pajak**

Untuk memahami mengapa seseorang harus membayar pajak dalam membiayai pembangunan yang sedang terus dilaksanakan, maka perlulah dipahami terlebih dahulu akan pengertian pajak itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat bahwa “...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Dari uraian di atas tampak bahwa karena kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini salah satunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang dipungut haruslah berdasarkan Undang-Undang. Dengan dasar ini berarti pemungutan pajak tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Untuk mengetahui definisi dari pajak itu, berikut pendapat yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[[10]](#footnote-11)

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pungutan pajak dapat dipaksakan artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan, sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu secara langsung seperti halnya retribusi.

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Agar ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk Undang-Undang. Unsur pemaksaan disini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, maka pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya.[[11]](#footnote-12)

Sementara itu Soeparman Soemahamidjaya berpendapat bahwa:

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.[[12]](#footnote-13)

Pendapat diatas sedikit berbeda dengan pendapat yang dikemukakan sebelumnya dimana disini Soeparman Soemahamidjaya mengatakan bahwa pajak itu adalah iuran wajib rakyat untuk negara. Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, diharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dan kerja sama dari wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan. Beliau berpendapat bahwa terlalu berlebihan jika persoalan pajak ditekankan pentingnya paksaan itu, seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Beliau selanjutnya menekankan bahwa cukup dikatakan saja bahwa pajak adalah iuran wajib tidak usah diberi tambahan yang dapat dipaksakan, karena dengan istilah “iuran wajib” masyarakat sudah cukup memahaminya.

Selanjutnya pandangan S. I. Djajadinigrat tentang pajak bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.[[13]](#footnote-14)

Berdasarkan pandangan S. I. Djajadiningrat tersebut, maka dapat kita katakan bahwa hakekat dari pajak adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk disumbangkan kepada negara berdasar pada aturan yang telah ada. Pajak bukan sebagai bentuk hukuman melainkan hanya sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan umum, dan tanpa prestasi secara langsung pada saat itu juga tetapi akan dinikmati hasilnya melalui pembangunan dan pelayanan umum.

Adapun pendapat dari Waluyo lebih menekankan kepada ciri atau unsur yang melekat dalam pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public invesment.*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.[[14]](#footnote-15)

Sedangkan yang dimaksud pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak itu adalah pungutan wajib warga negara untuk disetor ke kas negara atas sebagian harta yang dimiliki tanpa adanya prestasi langsung atau dengan kata lain, imbalan dari pungutan tersebut tidak diberikan secara langsung pada saat itu juga, tetapi akan digunakan nantinya untuk membiayai keperluan negara melalui pembangunan serta pelayanan umum yang nantinya akan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

1. **Penggolongan Pajak**

Secara umum penggolongan pajak dapat kita lihat dengan meninjau beberapa segi yaitu:

1. Pajak yang ditinjau dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak, yang termasuk kategori ini adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
2. Pajak yang ditinjau dari segi mulai timbulnya utang pajak, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.
3. Pajak yang ditinjau dari segi pembebanan pajak dan administrasi pajak, Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.
4. **Pajak Negara dan Pajak Daerah**

Timbulnya penggolongan pajak negara dan pajak daerah adalah sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang berhak memungut pajak adalah Pemerintah Pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai Pajak Negara, yang juga disebut Pajak Pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak Pemerintah daerah disebut Pajak Daerah.[[15]](#footnote-16)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat yang berhak memungut pajak adalah Departemen Keuangan, yang jenis pajaknya terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPn), termasuk Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM)
3. Bea Materai
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
6. Cukai
7. Bea Masuk
8. Pajak Ekspor

Sedangkan yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Otonom, baik pada Daerah Tingkat Provinsi maupun Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Adapun jenis-jenis pajak yang termasuk Pajak Daerah Tingkat Provinsi berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok

Dan yang termasuk jenis-jenis Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
12. **Pajak Objektif dan Pajak Subjektif**

Mulai timbulnya kewajiban pajak ada yang diawali dengan subjek pajak dan ada pula yang diawali dengan objek pajak. Jenis-jenis pajak yang mulai timbulnya kewajiban pajak diawali dengan subjek pajak digolongkan sebagai Pajak Subjektif. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang mula timbulnya kewajiban pajak diawali dengan objek pajak disebut golongan Pajak Objektif.[[16]](#footnote-17)

Adapun jenis-jenis pajak yang tergolong Pajak Subjektif antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Bangsa Asing (PBA)
3. Pajak Kekayaan

Sedangkan jenis-jenis pajak yang tergolong Pajak Objektif yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Bea Materai
4. Pajak Pembangunan I (PPb I).
5. **Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung**

Penggolongan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung ditinjau dari segi administrasi pemungutan dan pembebanan. Disebut sebagai Pajak Langsung, karena administrasi pemungutannya dilakukan secara periodik (berkala) dalam hal ini setahun sekali dan tahun tersebut adalah Tahun Pajak atau Tahun Takwim. Sifat Pajak Langsung ditinjau dari pembebanan pajak adalah bahwa beban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Sebaliknya, sifat Pajak Tidak Langsung bahwa beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, dalam hal ini konsumen melalui penambahan pajak pada harga jual.[[17]](#footnote-18)

 Adapun yang termasuk Pajak Langsung antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPn)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Bangsa Asing (PBA)

Sedangkan yang termasuk Pajak Tidak langsung antara lain:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
2. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM)
3. Bea Materai
4. Bea Masuk
5. Cukai
6. Pajak Pembangunan (PPb I)
7. Pajak Tontonan dan Keramaian Umum.
8. **Fungsi Pajak**

 Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak dari rakyatnya pasti memiliki tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan negara Republik Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan dan menggerakkan roda pembangunan dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan semua itu, diperlukan sumber dana yang datangnya dari rakyat sendiri dan salah satunya melalui pemungutan pajak.

Mengenai fungsi dari pajak, dapat dibedakan atas dua yaitu Fungsi *Budgter* (Fungsi Finansial), dan Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur). Adapun yang dimaksud kedua fungsi tersebut yaitu:

1. Fungsi *Budgeter* (Fungsi Finansial), fungsi pajak adalah suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang pada umumnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin .
2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur), fungsi pajak berarti bahwa pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi, dan banyak ditujukan pada sektor swasta.[[18]](#footnote-19)

Secara garis besar pajak memiliki dua fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber atau pundi-pundi keuangan negara yang bertujuan untuk mengisi kas negara agar negara memiliki dana untuk memenuhi pembiayaan kehidupannya, fungsi ini disebut sebagai Fungsi Finansial atau Fungsi *Budgeter.* Sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang disebut Fungsi Mengatur atau Fungsi *Regulerend.*

Sedangkan menurut Wirawan B. Ilyas bahwa selain Fungsi *Budgeter* dan *Regulerend*, pajak juga memiliki beberapa fungsi lain diantaranya:

1. Fungsi Demokrasi, yaitu pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.
2. Fungsi Redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak yang lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).[[19]](#footnote-20)

Menurut Fidel, selain fungsi budgeter dan fungsi regulerend pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

Fungsi Pajak itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan uang bagi kas negara. Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pajak juga untuk melaksankan kebijakan di bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Contohnya yaitu:

1. Bidang Ekonomi

Ketika pemerintah mengharapkan agar industri dalam negeri tidak mati/gulung tikar, dan/atau tidak mampu bersaing dengan produksi dari luar negeri, maka pemerintah membuat peraturan berupa pengenaan tarif tinggi bagi produk luar negeri tersebut, dan/atau bahkan pemerintah memberikan insentif kepadan perusahaan industri dalam negeri.

1. Bidang Moneter

Pemerintah dapat saja memberikan pengampunan pajak, dengan tujuan untuk merangsang atau memancing masuknya aliran dana (pemilik lokal) dari luar negeri ke dalam negeri.

1. Bidang Sosial

Pajak dikenakan terhadap barang-barang mewah, sperti mobil, sehinggan masyarakat yang ingin hidup mewah memikul beban biaya yang tnggi.

1. Bidang Budaya

Pemerintah dapat memberikan insentif dan atau pengurangan pajak terhadap orang pribadi dan perusahaan yang usahanya untuk mengangkat budaya masyarakat yang mungkin akan punah (bahkan punah).[[20]](#footnote-21)

Jadi pada hakekatnya pajak bukanlah pungutan yang hanya sekedar memaksa, membebani dan memberatkan masyarakat tanpa adanya maksud dan tujuan yang jelas. Karena pajak memiliki beberapa fungsi yang sangat penting adanya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara dan tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

1. **Asas Pemungutan Pajak**

Dalam hal pemungutan pajak tentunya harus memiliki asas yang jelas. Yang dimaksud asas adalah landasan atau dasar yang dijadikan sebagai acuan atau patokan. Untuk memungut pajak sudah semestinya dilandasi dengan asas-asas yang baik yang dapat menjadi ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan *”four canons taxation”* atau sering disebut ”*The Four Maxims*” dengan uraian sebagai berikut:

1. *Equality* (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima di bawah perlindungan negara. Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak.
2. *Certainty* (asas kepastian), asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.
3. *Conveniency of Payment* (asas menyenangkan). Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.
4. *Low Cost Collection* (asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang diterima. Pemungutan pajak harus sesuai dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.[[21]](#footnote-22)

Pendapat di atas menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah didasarkan atas empat asas, yaitu: asas persamaan, asas kepastian, asas menyenangkan, dan asas efisiensi. Keempat asas tersebut pada dasarnya dalam pemungutan pajak haruslah memperhatikan keadaan wajib pajak. Dan memang pada intinya, dalam memungut pajak haruslah mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat (wajib pajak), pajak itu tidak boleh ada unsur kesewenang-wenangan dan penindasan bagi masyarakat. Harus melihat kondisi wajib pajak terlebih dahulu sebelum memungut pajak.

1. **Sistem Pemungutan Pajak**
2. **Pemungutan Pajak Berdasarkan Waktu Pemungutannya**

Untuk masalah pemungutan pajak berdasarkan waktu pemungutannya dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

1. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama setahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

1. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali.[[22]](#footnote-23)

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam pemungutan pajak dikenal tiga jenis stelsel, yaitu: stelsel nyata, yang mana pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun yakni setelah banyaknya penghasilan diketahui. Yang kedua adalah stelsel anggapan, yang didasarkan anggapan bahwa penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditentukan jumlah pajak terutang. Dan yang ketiga adalah stelsel campuran yang menggabungkan antara stelsel nyata dan anggapan.

Ketiga stelsel tersebut juga masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan, dan untuk menentukan stelsel mana yang akan digunakan maka perlu dilihat dulu kelemahan dan kelebihannya masing-masing untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pajak terutang.

**2.** **Pemungutan Pajak Berdasarkan Pihak yang Berwenang Menentukan Besarnya Pajak**

Dalam pemungutan pajak berdasarkan pihak yang berwenang menentukan besarnya pajak dikenal dua sistem yang masih berlaku sampai saat ini yakni:

1. *Official Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya adalah:
2. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
3. Wajib pajak bersifat pasif
4. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
5. *Self Assesment System,* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dilaporkan, yang dikenal dengan *Self Assesment System*.[[23]](#footnote-24)

Pada pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadi kesimpulannya adalah, di Indonesia berdasarkan peratuaran perundang-undangan memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dilunasi. Konsekuensi diterapkannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya.

1. **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**
2. **Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Landasaan utama setiap pajak dan pungutan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 A bahwa “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan dasar hukum berlakunya Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Negara, dalam hal ini Pajak Umum, yaitu suatu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan instansi operasionalnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun meskipun demikian, 90 % (sembilan puluh persen) dari seluruh penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan Pemerintah Daerah, dengan perincian:

1. 10 % (sepuluh persen) dari 90 % (sembilan puluh persen) disisihkan upah pungut.
2. 20 % (dua puluh persen) dari 80 % (delapan puluh persen) merupakan bagian Daerah Tingkat I.
3. Sedangkan sisanya (60 %) merupakan bagian Pemerintah Daerah Tingkat II.[[24]](#footnote-25)
4. **Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, termasuk perairan. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang didirikan atau dibangun di atas tanah dan atau perairan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 pasal 1 ayat (1) dan (2), dijelaskan mengenai bumi dan bangunan serta yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan. Bahwa yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Adapun permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sementara yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplesemennya, dan lain-lain merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan tol
3. Pagar mewah
4. Tempat olahraga
5. Galangan kapal, dermaga
6. Taman mewah
7. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
8. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Jadi yang menjadi objek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan yang digunakan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan bagi seseorang atau badan.

Adapun objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 pasal 3 ayat (1) adalah:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum debebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Tidak semua objek pajak dapat dikenakan atau dibebankan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan karena berdasarkan ketentuan hukum terdapat beberapa pengecualian terhadap objek pajak tertentu untuk dibebaskan dari pungutan pajak. Pengecualian yang dimaksud adalah objek pajak yang digunakann semata-mata untuk kepentingan umum atau pelayanan umum yang tidak ada maksud meraih keuntungan, seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, hutan lindung, dan sebagainya, selama objek tersebut tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan bagi seseorang atau pihak tertentu.

1. **Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dan subjek pajak yang dibebankan kewajiban membayar pajak disebut wajib pajak.

Subjek pajak harus mendaftarkan diri sebagai subjek atau wajib pajak. Pendaftaran dilakukan di Kantor-kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang atau badan tersebut dengan menggunakan suatu formulir yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.[[25]](#footnote-26)

Adapun dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Subjek pajak yang ditetapkan dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. Dan apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.[[26]](#footnote-27)

Kemudian untuk lebih memahami persoalan penetapan subjek atau wajib pajak yang harus melunasi utang pajak karena status kepemilikan objek yang tidak jelas berikut beberapa uraian contoh kasus:

1. Subjek pajak bernama A memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena suatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka A memanfaatkan atau menggunakan bumi atau bangunan tersebut yang akan ditetapkan sebagai wajib pajak.
2. Suatu objek pajak ternyata masih dalam suatu sengketa kepemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut yang akan ditetapkan sebagai wajib
3. Subjek pajak dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut telah dikuasakan kepada orang lain, maka orang atau badan yang diberi kuasa akan ditunjuk sebagai wajib pajak.[[27]](#footnote-28)

Jadi untuk persoalan suatu objek pajak yang tidak jelas status kepemilikannya, maka untuk menentukan siapa yang dijadikan subjek pajak yang wajib melunasi utang pajak atas objek tersebut, maka kita lihat siapa yang menempati atau menguasai dan mengambil manfaat atas objek tersebut. Siapapun yang mengambil keuntungan atas objek tersebut meskipun ia bukan sebagai pemilik sahnya, maka dialah yang ditetapkan sebagai wajib pajak atas objek pajak tersebut dan diwajibkan melunasi utang pajaknya.

1. **Cara Menghitung Pajak yang Terutang Pada Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Nilai Jual Kena Pajak diperoleh setelah diadakan perkalian 20 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak ini dihitung sesuai dengan harga pasar yang berlaku terhadap tanah dan bangunan.[[28]](#footnote-29)

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah: 0,5 %. Batas Nilai Jual Tidak Kena Pajak (BNJTKP) adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), artinya wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang Nilai Jual Objek Pajaknya hanya sebesar Rp 8.000.000,- maka wajib pajak tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Rumusnya adalah: NJKP = 20 % x NJOP. Tarif PBB adalah: 0,5 % NJKP = utang PBB.[[29]](#footnote-30)

Jadi untuk setiap objek PBB yang memiliki nilai jual tidak melebihi Batas Nilai Jual Tidak Kena Pajak (BNJTKP) yang telah ditentukan, yaitu Rp 8.000.000,- maka itu tidak dikenakan pajak.

1. **Kerangka Pikir**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber dana terbesar suatu negara yang dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Keberadaan pajak tersebut sangatlah penting dalam rangka memenuhi segala kebutuhan negara dan seluruh rakyatnya.

Indonesia sendiri adalah suatu negara yang memiliki cita-cita untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya, hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Dan untuk mewujudkannya, sudah barang tentu membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit dan diharapkan selalu tersedia. Maka sumber dana yang dimaksud, salah satunya berasal dari pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang sumbernya dari rakyat sendiri yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Masyarakat diwajibkan menyetorkan pajaknya berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Namun dari hasil pungutan pajak tersebut tidak mendapatkan prestasi atau imbalan secara langsung pada saat itu juga, melainkan hasilnya dapat dirasakan nantinya melalui pembangunan dan pelayanan umum.

Dengan adanya ketentuan hukum akan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh wajib pajak. Kewajiban yang dimaksud disini adalah setiap wajib pajak dituntut untuk meningkatkan kepatuhannya membayar pajak. Adapun kepatuhan hukum yang akan dikaji disini adalah kepatuhan dari segi *compliance* .Tingkat kepatuhan tersebut kemudian dapat diukur dengan melihat beberapa indikator, diantaranya apakah masyarakat menerima dan menyetujui akan segala aturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, serta apakah masyarakat mematuhi aturan tersebut karena adanya ketakutan terhadap sanksi jika melakukan pelanggaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat skema kerangka pikir di bawah ini:

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 A

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan Hukum Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Tingkat Kepatuhan Hukum *Compliance* Masyarakat:

* Menerima secara terbuka aturan tentang PBB
* Takut terhadap sanksi

Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat:

* Penyuluhan Hukum
* Pemberian Sanksi

Masyarakat Patuh Bayar Pajak Bumi dan Bangunan

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Variabel dan Desain Penelitian**
2. **Variabel Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi objek sasaran atau titik pandang dari kegiatan penelitian. [[30]](#footnote-31) Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1. **Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan tentang kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan rekaman data penelitian tentang objek yang diteliti kemudian ditelaah untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

1. **Definisi Operasional Variabel**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah tersebut, diantaranya:

1. Kepatuhan Hukum adalah ketaatan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, yang mana ketaatan tersebut bermula dari adanya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman terhadap suatu aturan hukum sehingga ia tergerak dan termotivasi untuk melaksanakan hal yang diatur di dalamnya. Dalam penelitian ini diangkat salah satu indikator kepatuhan hukum yakni kepatuhan dari segi *compliance,* yaitu kepatuhan yang ditandai dengan penerimaan atau persetujuan masyarakat terhadap suatu aturan hukum kemudian mematuhinya karena adanya ketakutan terhadap sanksi.
2. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang objeknya adalah bumi dan bangunan yang dikuasai dan atau dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh seseorang atau badan tertentu yang nilai jual dari objek tersebut melebihi nilai jual minimum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Rp 8.000.000,-.
3. **Populasi dan Sampel**
4. **Populasi**

Menurut Sukardi bahwa populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.[[31]](#footnote-32)

Populasi merupakan objek suatu penelitian yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain populasi adalah semua jumlah responden yang dijadikan objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Lurah Paria, penagih hutang Pajak Bumi dan Bangunan dari setiap lingkungan yang berjumlah 2 orang, dan seluruh Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang sekaligus adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan karena masing-masing kepala keluarga memiliki lahan dan bangunan kena pajak. Jumlahnya adalah 684 kepala keluarga (wajib pajak).

Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan dan penyebaran populasi penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Keadaan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **LINGKUNGAN** | **JUMLAH WAJIB PAJAK** |
| 1. | TENGNGA | 373 |
| 2.  | LOMPO | 311 |
| **JUMLAH** | 684 |

Sumber: Kantor Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

 3 Januari 2014.

1. **Sampel**

Menurut Husaini Usman bahwa sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.[[32]](#footnote-33)

Sedangkan Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa:

Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subyeknya besar maka dapat diambil antara 10 atau 20 sampai 25 % atau lebih.[[33]](#footnote-34)

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini cukup banyak, maka hanya akan diambil 10 % dari populasi untuk dijadikan sampel, dengan perincian 10 % dari Lingkungan Tengnga dan 10 % dari Lingkungan Lompo, sehingga sampel yang diambil berjumlah 68 wajib pajak. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Sampel Penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **LINGKUNGAN** | **JUMLAH SAMPEL** |
| 1. | TENGNGA | 373 X 10 =37  100 |
| 2. | LOMPO | 311 X 10 = 31 100 |
| **JUMLAH** | 68 |

Angka 37 diatas merupakan jumlah wajib pajak sebagai sampel yang diambil dari Lingkungan Tengnga sebanyak 10 % dari 373 adalah 37,3 dibulatkan menjadi 37. Begitupun dengan sampel yang diambil dari Lingkungan Lompo yang berjumlah 31 wajib pajak yang merupakan 10 % dari 311 adalah 31,1 dibulatkan menjadi 31.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *Simple Random Sampling* (Sampling Acak Sederhana), yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan langsung pada anggota sampel yang diambil secara acak.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket (Kuesioner)

Moehar Daniel menyatakan bahwa kuesioner atau daftar pertanyaan berisi satu set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian.[[34]](#footnote-35)

Dalam penelitian ini akan diajukan angket kepada responden terpilih yaitu masyarakat dalam hal ini wajib Pajak Bumi dan Bangunan, untuk mengungkap masalah kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada Lurah Paria, dan penagih hutang pajak sejumlah 2 orang yang bertujuan untuk memperoleh informasi guna menjawab permasalahan yang dikaji.

1. Dokumentasi

Menurut Sukardi bahwa dokumentasi adalah informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.[[35]](#footnote-36)

Dalam penelitian ini, data dalam bentuk dokumentasi adalah data tertulis tentang keadaan penduduk dan keadaan geografis lokasi penelitian.

1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis persentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Anas Sudiyono di bawah ini:[[36]](#footnote-37)

**P = f x 100 %**

 **N**

Dimana: P = persentase

 f = frekuensi jawaban

 N = jumlah sampel

Kemudian untuk menarik kesimpulan secara kualitatif, berikut pedoman yang dikemukakan oleh Arikunto:[[37]](#footnote-38)

0 – 40 % = Sangat Rendah (Tidak Baik)

41 – 55 % = Rendah (Kurang Baik)

56 – 75 % = Tinggi (Baik)

76 – 100 % = Sangat Tinggi (Sangat Baik)

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
2. **Kondisi Geografis**

Kelurahan Paria merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang secara pemerintahan terbagi atas dua Lingkungan, yaitu Lingkungan Tengnga dan Lingkungan Lompo. Kelurahan Paria merupakan ibu kota Kecamatan Majauleng dan berjarak 28 kilometer dari ibu kota Kabupaten.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

* Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Uraiyang
* Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Limpomajang
* Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laerung
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cinnongtabi

Sedangkan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Luas Wilayah Kelurahan Paria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LINGKUNGAN** | **LUAS****Ha/M2** | **JUMLAH** |
| **RT** | **RW** |
| 1. | TENGNGA | 7, 25  | 6 | 2 |
| 2. | LOMPO | 4, 75 | 6 | 2 |
| **Jumlah** | **12** | **12** | **4** |

Sumber: Kantor Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

 3 Februari 2014.

1. **Struktur Organisasi Kelurahan Paria**

Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan Paria

**LURAH**

**BAHARUDDIN, S NIP. 19631231 198908 1 009**

**SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

**ROMI DIPANEGARA, SH NIP. 19820515 200701 1001**

**SEKSI PEREK. / KESRA**

**A. BASO TENRIJAJA, S.Sos NIP. 19710715 199703 1 002**

**SEKSI PEMERINTAHAN**

**H. ABDUL RASYID NIP. 19671231 199102 1004**

**SEKSI PEMBANGUNAN**

**ANDI SYAFARUDDIN, S.Sos NIP. 196701231 198903 1 008**

**SEKRETARIS**

**SUMANGE NIP. 19580309 198312 1009**

**KELOMPOK FUNGSIONAL**

Sumber: Kantor Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo 3 Februari 2014

**KEPALA LINGK. LOMPO**

**H. BASO SAHRANI**

**KEPALA LINGK. TENGNGA**

**ANDI USMAN**

1. **Kondisi Demografis**
2. **Jumlah Penduduk**

Berdasarkan laporan bulanan penduduk kelurahan pada awal Januari 2014, tercatat jumlah penduduk Kelurahan Paria sebanyak 2.601 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1246 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1355 jiwa serta terdapat 684 kepala keluarga yang tersebar di dua Lingkungan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Keadaaan Penduduk Kelurahan Paria

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LINGKUNGAN** | **L** | **P** | **L+P** | **KK** |
| 1. | TENGNGA | 645 | 715 | 1360 | 373 |
| 2. | LOMPO | 601 | 640 | 1241 | 311 |
| **Jumlah** | **1.246** | **1.355** | **2.601** | **684** |

Sumber: Kantor Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

3 Januari 2014

1. **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Paria sangat beragam mulai dari usia belum sekolah sampai tingkat sarjana, namun angka tertinggi terdapat pada kategori penduduk yang tamat SMA sebanyak 783 orang, sedangkan untuk kategori yang lulus sarjana (S1, S2, S3) terdapat 131 orang. Lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Paria

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **TINGKAT PENDIDIKAN** | **JUMLAH PENDUDUK** |
| 1. | Belum Sekolah | 251 Orang |
| 2. | Tidak Tamat SD | 417 Orang |
| 3. | Tamat SD | 538 Orang |
| 4. | Tamat SMP | 379 Orang |
| 5. | Tamat SMA | 783 Orang |
| 6. | Diploma | 102 Orang |
| 7. | Sarjana (S1, S2, S3) | 131 Orang |
| **Jumlah** | **2.601 Orang** |

Sumber: Kantor Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

3 Februari 2014.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Paria memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan pendidikan, hal ini dibuktikan dengan jumlah lulusan untuk jenjang pendidikan tertinggi yang lumayan banyak seperti lulusan SMA dan Sarjana.

1. **Mata Pencaharian**

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Paria adalah mayoritas berprofesi sebagai petani yaitu sebanyak 637 orang. Namun meskipun demikian masih terdapat beberapa penduduk yang berprofesi di bidang lain seperti PNS, ABRI, Bidan, Wiraswasta, Tukang, dan Buruh. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Paria

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **MATA PENCAHARIAN** | **JUMLAH PENDUDUK** |
| 1. | Petani | 637 Orang |
| 2. | Buruh | 145 Orang |
| 3. | Tukang | 24 Orang |
| 4. | Wiraswasta | 119 Orang |
| 5. | ABRI | 1 Orang |
| 6. | Bidan | 1 Orang |
| 7. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 71 Orang |

Sumber: Kantor Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

 3 Februari 2014

1. **Potensi dan Sarana Sosial**
2. **Sarana Pendidikan**

Terkait masalah sarana pendidikan, Kelurahan Paria dapat dikatakan salah satu kelurahan yang memiliki sarana pendidikan terlengkap, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya beberapa sekolah untuk semua jenjang di wilayah Kelurahan Paria, dimana terdapat 2 Taman Kanak-Kanak, 4 SD, 1 SMP, dan 2 SMA yang tersebar di dua lingkungan. Di Lingkungan Tengnga terdapat 1 TK, 2 SD, 1 SMP, dan 2 SMA, sedangkan di Lingkungan Lompo terdapat 1 TK, dan 2 SD.

1. **Sarana Kesehatan**

Dalam hal sarana kesehatan untuk masyarakat, maka di Kelurahan Paria juga terdapat beberapa pusat kesehatan yaitu 1 Pustu, 3 Posyandu, dan 1 Puskes Hewan yang tersebar masing-masing di setiap Lingkungan. 1 Pustu dan 2 Posyandu letaknya di Lingkungan Lompo, sedangkan di Lingkungan Tengnga terdapat 1 Posyandu dan 1 Puskes Hewan.

1. **Sarana Sosial dan Keagamaan**

Pemerintah juga tak lupa menyediakan sarana sosial dan keagamaan untuk kepentingan masyarakat, yakni terdapat 4 Masjid yang tersebar di dua lingkungan, 3 di Lingkungan Tengnga dan 1 di Lingkungan Lompo. Serta terdapat 3 sarana olahraga, 2 terletak di Lingkungan Tengnga dan 1 di Lingkungan Lompo.

1. **Deskripsi Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang mana datanya diperoleh melalui hasil angket sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, selain itu data juga diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memiliki kaitan dan banyak mengetahui seputar permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh melalui angket selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis persentase yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, serta disandingkan dengan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Data yang disajikan yaitu hasil analisis setiap item berdasarkan permasalahan yang akan dijawab dan selanjutnya dianalisis secara umum untuk mengetahui gambaran hasil penelitian secara keseluruhan. Adapun analisis data selengkapnya sebagai berikut:

1. **Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat dari Segi *Compliance* dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.**

Berdasarkan pendapat Leopold Pospisil sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian Bab II menyatakan bahwa indikator kepatuhan hukum masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi, salah satunya dari segi *compliance,* yaitu adanya persetujuan atau penerimaan secara terbuka terhadap suatu aturan hukum dan adanya ketakutan masyarakat terhadap sanksi yang akan diterima apabila tidak mematuhi hukum.

Berangkat dari teori tersebut, maka untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* digunakanlah dua indikator umum yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa item pertanyaan dalam bentuk angket. Indikator yang pertama adalah ditinjau dari segi persetujuan atau penerimaan secara terbuka oleh masyarakat akan segala ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan indikator yang kedua adalah dari segi kepatuhan masyarakat karena ketakutan akan sanksi jika melanggar hukum.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah masyarakat menyetujui atau menerima aturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan berikut akan dipaparkan respon atau tanggapan masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan:

Tabel 7. Tanggapan responden terhadap adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Setuju  | 15 | 22 % |
| 2. | Tidak Setuju | 53 | 78 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 1, (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 68 responden, yang menjawab Setuju terhadap adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 15 responden atau 22 %, sedangkan yang Tidak Setuju sebanyak 53 responden atau 78 %. Jadi mengacu dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak menyetujui atau tidak menerima adanya aturan hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Selanjutnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Baharuddin, S selaku Lurah Paria, bahwa:

Masyarakat secara umum memang kurang menunjukkan respon positif terhadap adanya ketentuan yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya kepatuhan masyarakat dalam hal pembayaran pajak, seperti masih banyak yang menunggak hutang pajaknya. Penyebab utama dari hal ini adalah karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hakekat dari pemungutan pajak, sehingga banyak saya lihat masyarakat yang beranggapan bahwa buat apa selalu bayar pajak tapi kita tidak mendapatkan imbalan. (Hasil Wawancara Tanggal 3 Februari 2014).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan juga diatur masalah sanksi atas segala pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diatur dalam pasal 24 dan 25 terkait dengan ketentuan pidana. Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan menegaskan bahwa barang siapa karena kealpaannya:

1. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jendral Pajak;
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang

Sedangkan dalam pasal 25 menegaskan bahwa:

(1). Barang siapa dengan sengaja:

1. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jendral Pajak;
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
3. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
4. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
5. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

Sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak terhutang.

(2). Terhadap bukan Wajib Pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(3). Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

Pasal di atas sudah cukup jelas menegaskan mengenai sanksi pidana yang dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sebagai masyarakat yang patuh terhadap hukum, maka sepatutnya mereka tidak melanggar segala hal yang diatur dalam hukum tersebut karena adanya rasa takut akan sanksi pidana yang bisa dijatuhkan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai sanksi tersebut, berikut pemaparan data selengkapnya:

Tabel 8. Tanggapan responden terhadap sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Takut  | 7 | 10 % |
| 2. | Tidak Takut | 61 | 90 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 2, (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 68 responden, yang menjawab Takut sebanyak 7 responden atau 10 % , sedangkan yang menjawab Tidak Takut sebanyak 61 responden atau 90 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum tidak takut terhadap sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Kondisi tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Andi Usman selaku penagih pajak Lingkungan Tengnga bahwa:

Masyarakat sejauh ini tidak terlalu takut akan sanksi yang berkaitan dengan PBB, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka mengenai adanya sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran, selain itu juga disebabkan karena selama ini penegakan sanksi tersebut memang tidak tegas, tidak pernah ada masyarakat yang sampai dipidana gara-gara PBB. (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2014).

Selanjutnya terkait masalah pendaftaran objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan menegaskan bahwa:

(1). Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

(2). Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak.

(3). Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari penerimaan dan persetujuan masyarakat terhadap aturan hukum maka secara otomatis dan sudah sepatutnya mereka melaksanakan segala apa yang telah diatur di dalamnya seperti pasal yang mengatur mengenai pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan di atas. Berikut akan dipaparkan tabel mengenai pendaftaran objek pajak yang dimiliki oleh masyarakat:

Tabel 9. Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki oleh responden.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Sudah Semua | 5 | 7 % |
| 2. | Sudah Sebagian | 63 | 93 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 3, (April 2014)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 5 responden atau 7 % menjawab Sudah Semua, itu artinya semua objek pajak yang mereka miliki sudah didaftarkan, sedangkan responden yang menjawab Sudah Sebagian sebanyak 63 orang atau 93 % artinya masih ada objek pajak yang belum didaftarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya baru mendaftarkan sebagian objek Pajak Bumi dan Bangunan yang mereka miliki.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Baharuddin, S bahwa:

Di Kelurahan Paria, masih sangat banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan objek pajaknya sehingga tidak terdata dan tidak dikenakan pajak. Selain itu meskipun mereka telah mendaftarkan objek pajaknya namun terkadang masih ada pihak yang bersifat tidak jujur dengan melaporkan luas objek pajak tidak berdasarkan dengan kondisi sebenarnya. (Hasil Wawancara Tanggal 3 Februari 2014).

Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan dalam hal pendaftaran objek pajak, masyarakat belum mematuhi aturan yang ada, artinya mereka melanggar ketentuan yang diatur di dalamnya dan berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya bahwa apabila terjadi pelanggaran akan ada sanksi. Untuk itu masyarakat yang melanggar sepatutnya menyadari hal itu dan bersedia menerima sanksi atas perbuatannya. Berikut akan dipaparkan data mengenai kesediaan masyarakat menerima sanksi:

Tabel 10. Kesediaan responden menerima sanksi jika masih ada objek Pajak Bumi dan Bangunan yang belum didaftarkan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Bersedia  | 6 | 9 % |
| 2. | Tidak Bersedia | 62 | 91 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 4, (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 6 responden atau 9 % menjawab Bersedia, artinya mereka siap menerima sanksi jika masih ada objek pajak yang belum didaftarkan, sedangkan yang menjawab Tidak Bersedia sebanyak 62 responden atau 91 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat tidak bersedia menerima sanksi.

Kemudian mengenai tarif pajak, sesuai dengan ketetapan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 % (lima persepuluh persen).

 Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Nilai Jual Kena Pajak diperoleh setelah diadakan perkalian 20 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ini dihitung sesuai dengan harga pasar yang berlaku terhadap tanah dan bangunan. Rumusnya adalah: NJKP = 20 % x NJOP. Tarif PBB adalah 0,5 % NJKP = hutang PBB.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai jumlah hutang pajak yang harus dibayar setiap tahunnya, berikut akan dipaparkan datanya:

Tabel 11. Tanggapan reponden mengenai jumlah hutang Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar setiap tahunnya.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Tidak Terbebani | 10 | 15 % |
| 2. | Terbebani | 58 | 85 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 5, (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah responden yang menjawab Tidak Terbebani sebanyak 10 orang atau 15 %, sedangkan yang menjawab Terbebani sebanyak 58 orang atau 85 %. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kelurahan Paria pada umumnya merasa terbebani dengan jumlah hutang pajak yang harus di bayar setiap tahunnya.

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditegaskan mengenai jangka waktu pembayaran hutang pajak bahwa: Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.

Sebagai wujud ketakutan terhadap sanksi, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi masyarakat untuk senantiasa patuh dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang, seperti masalah tenggang waktu pembayaran hutang pajak, dimana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang bahwa tenggang waktu pembayaran hutang pajak dilakukan paling lambat enam bulan setelah wajib pajak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Untuk mengetahui berapa lama jangka waktu masyarakat membayar pajak setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berikut pemaparan tabelnya:

Tabel 12. Jangka waktu reponden membayar pajak setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | 1 - 6 Bulan | 5 | 7 % |
| 2. | Setelah Lewat 6 Bulan | 63 | 93 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 6, (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat responden yang membayar pajak dalam jangka waktu sekitar 1 - 6 Bulan setelah menerima SPPT sebanyak 5 orang atau 7 %, sedangkan yang menjawab Setelah Lewat 6 Bulan sebanyak 63 orang atau 93 %.

Dengan demikian berdasarkan ketetapan pasal 11 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kelurahan Paria pada umumnya baru membayar pajak setelah lewat dari enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, itu berarti mereka terlambat dan tidak takut terhadap sanksi.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Drs. Nuralang selaku penagih hutang pajak Lingkungan Lompo bahwa:

Ketika saya mendatangi rumah wajib pajak untuk menagih hutang pajaknya, sangat sedikit dari mereka yang langsung membayar, sangat banyak yang baru membayar setelah ditagih berulang-ulang dan bahkan ada wajib pajak yang menunggak sampai 5 tahun tidak melunasi hutang pajaknya. (Hasil Wawancara Tanggal 5 Februari 2014).

Menurut keterangan yang disampaikan oleh penagih hutang pajak di atas, menyatakan bahwa sangat banyak masyarakat yang selalu menunggak pembayaran hutang pajaknya dari tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dimana banyak masyarakat ditagih berulang kali baru membayar, dan selain itu bahkan ada yang menunggak sampai 5 tahun.

Berdasarkan uraian data di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kelurahan Paria secara umum selalu terlambat membayar pajak dari tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk mengetahui responden yang pernah terlambat membayar hutang pajaknya, akan dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Data mengenai keterlambatan responden membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Tidak Pernah | 7 | 10 % |
| 2. | Pernah | 61 | 90 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 7, (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 68 responden yang menjawab Tidak Pernah sebanyak 7 orang atau 10 %, sedangkan yang menjawab Pernah sebanyak 61 responden atau 90 %. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum masyarakat pernah terlambat membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Andi Usman bahwa:

Sangat jarang masyarakat yang satu kali ditagih langsung membayar, kebanyakan saya mendatangi mereka dua sampai 3 kali baru mereka membayar dan rata-rata masyarakat baru membayar pada saat sudah jatuh tempo. (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2014).

Kemudian Bapak Drs. Nuralang juga memberikan pernyataan yang sama bahwa:

Keterlambatan masyarakat Kelurahan Paria membayar pajak sangatlah tinggi karena lebih banyak yang sering terlambat daripada yang tepat waktu karena penagihan saya lakukan tak hanya satu dua kali saja, bahkan sampai lima kalipun masih saja ada masyarakat yang belum membayar, padahal saya rasa mereka bukan tidak punya uang tetapi memang mungkin sengaja menunda-nunda pembayarannya. (Hasil Wawancara Tanggal 5 Februari 2014).

Kedua informan di atas memberikan pernyataan yang senada terkait masalah intensitas keterlambatan masyarakat membayar pajak, dimana dikatakan bahwa tingkat keterlambatan masyarakat masih sangat tinggi, lebih banyak yang sering terlambat dari pada yang tepat waktu

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menegaskan bahwa pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Jadi sebagai masyarakat yang patuh terhadap hukum, maka sudah barang tentu mereka harus menanggung segala konsekuensi atas segala pelanggaran yang dilakukan, seperti terlambat membayar pajak dari tenggang waktu yang telah ditetapkan maka mereka harus membayar denda sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat (3) di atas. Untuk mengetahui apakah masyarakat membayar denda keterlambatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Pembayaran denda responden jika terlambat membayar hutang Pajak Bumi dan Bangunan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Bayar  | 4 | 6 % |
| 2. | Tidak Bayar  | 64 | 94 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 8, (April 2014)

Dari tabel di atas dapat diketahui mengenai pembayaran denda keterlambatan masyarakat membayar pajak. Dimana dari 68 responden yang menjawab Bayar sebanyak 4 responden atau 6 % artinya mereka membayar denda, sedangkan yang menjawab Tidak Bayar sebanyak 64 responden atau 94 %. Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa secara umum masyarakat Kelurahan Paria tidak membayar denda jika terlambat membayar pajak.

Selain hanya terlambat, tidak menutup kemungkinan masyarakat juga pernah tidak membayar hutang pajaknya dalam satu tahun pajak atau dalam satu periode. Sebagaiman hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nuralang yang telah dipaparkan sebelumnya,bahwa banyak masyarakat yang menunggak hutang pajaknya sampai lima tahun, itu artinya masyarakat banyak yang tidak membayar pajak bahkan sampai lima tahun. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya mengenai hal tersebut, berikut pemaparan hasil angket dari responden:

Tabel 15. Data responden yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu tahun pajak.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Tidak Pernah  | 8 | 12 % |
| 2. | Pernah | 60 | 88 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 9, (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, dari 68 responden terdapat 8 responden yang menjawab Tidak Pernah atau 12 % artinya mereka selalu membayar pajak dalam satu tahun pajak atau satu periode pajak, sedangkan yang menjawab Pernah sebanyak 60 responden atau 88 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kelurahan Paria pernah tidak membayar pajak dalam satu tahun pajak.

Kemudian akan diuraikan data mengenai alasan keterlambatan masyarakat membayar pajak. Melihat hasil angket mengenai data keterlambatan masyarakat dalam membayar pajak sebagaimana yang tampak pada tabel 13 menunjukkan tingkat keterlambatan yang cukup tinggi, namun tentu hal ini ada penyebabnya mengapa banyak masyarakat pernah terlambat membayar pajak.

 Untuk mengetahui penyebab keterlambatan responden dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 16. Alasan keterlambatan responden dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Lupa | 18 | 26 % |
| 2. | Malas  | 15 | 22 % |
| 3. | Belum Panen  | 28 | 41 % |
| 4. | Tidak Menjawab | 7 | 10 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 10, (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui beberapa alasan responden terlambat membayar pajak diantaranya, yang menjawab Lupa sebanyak 18 orang atau 26 %, yang menjawab Malas sebanyak 15 orang atau 22 %, dan yang menjawab Belum Panen sebanyak 28 orang atau 41 %, sedangkan yang memilih opsi Tidak Menjawab sebanyak 7 orang atau 10 % artinya mereka tidak pernah terlambat membayar pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan keterlambatan masyarakat umumnya adalah karena belum panen.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Usman menerangkan bahwa:

Ada banyak hal yang biasanya dijadikan alasan oleh wajib pajak ketika saya mendatangi mereka untuk melakukan penagihan, dan diantara alasan tersebut ada yang masuk akal dan dapat dimaklumi namun tak jarang juga wajib pajak yang memberikan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipercaya seperti tidak cukup uang, namun dalam kenyataannya saya perhatikan dalam kesehariaannya, bertolak belakang dengan apa yang mereka katakan. Dalam artian hidup mereka lumayan sejahtera. Namun pada umumnya karena mayoritas penduduk Kelurahan Paria berprofesi sebagai petani maka kebanyakan dari mereka beralasan hasil pertanian belum panen, dan itu masih dapat dimaklumi. Tetapi kadang juga mereka sudah panen namun memang malas untuk segera membayar pajaknya. (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2014).

Jadi menurut informan di atas bahwa ada banyak alasan yang biasanya dilontarkan oleh masyarakat ketika terlambat membayar pajak, dan diantara alasan mereka, ada yang dapat dimaklumi namun ada pula yang tidak. Tapi pada umumnya yang menjadi alasan keterlambatan masyarakat adalah hasil panen belum turun, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai petani.

Kemudian berdasarkan hasil angket mengenai data masyarakat yang tidak membayar pajak dalam satu tahun pajak sebagaimana yang tampak pada tabel 15 menunjukkan banyak masyarakat yang pernah tidak membayar pajak dalam satu tahun pajak, sama dengan adanya alasan mengapa mereka terlambat membayar pajak, tentu mereka juga memiliki alasan mengapa tidak membayar pajak dalam satu tahun pajak. Berikut akan dipaparkan tabel mengenai hal tersebut:

Tabel 17. Alasan responden tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu tahun pajak.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Lupa | 14 | 21 % |
| 2. | Malas  | 7 | 10 % |
| 3. | Hasil Panen Tidak Memuaskan/Gagal Panen  | 39 | 57 % |
| 4. | Tidak Menjawab | 8 | 12 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 11, (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat mengenai alasan responden tidak membayar pajak dalam satu periode pajak, dimana dari 68 responden yang menjawab Lupa sebanyak 14 orang atau 21 %, yang menjawab Malas sebanyak 7 orang atau 10 %, kemudian yang menjawab Hasil Panen Tidak Memuaskan/Gagal Panen sebanyak 39 orang atau 57 %, sementara yang memilih opsi Tidak Menjawab sebanyak 8 orang atau 12 % artinya responden tersebut tidak pernah tidak membayar pajak dalam satu tahun pajak.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan masyarakat tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu tahun pajak umumnya karena hasil panen tidak memuaskan atau gagal panen.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, berikut akan dipaparkan tabel rata-rata nilai berdasarkan pembobotan opsi jawaban dari tiap item pertanyaan. Dimana jumlah item pertanyaan untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* sebanyak 9 pertanyaan, yang mana setiap item diberi skor tertinggi 2 dan skor terendah 1. Sedangkan jumlah responden sebanyak 68 orang. Dengan demikian skor tertinggi (skor ideal) untuk setiap item pertanyaan adalah sebanyak 68 x 2 = 136. Sehingga skor ideal secara keseluruhan adalah 9 x 136 = 1224.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel 18 di bawah ini:

Tabel 18. Rata-rata nilai berdasarkan pembobotan opsi jawaban tiap item pertanyaan dalam angket tentang kepatuhan hukum *compliance* masyarakat.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Angket** | **Skor (n)** | **Skor Ideal (N)** | **n: N x 100 %** | **Kategori** |
| 1. | 83 | 136 | 61 % | Tinggi |
| 2. | 75 | 136 | 55 % | Rendah  |
| 3. | 73 | 136 | 54 % | Rendah  |
| 4. | 74 | 136 | 54 % | Rendah  |
| 5. | 78 | 136 | 57 % | Tinggi |
| 6. | 73 | 136 | 54 % | Rendah  |
| 7. | 75 | 136 | 55 % | Rendah  |
| 8. | 72 | 136 | 53 % | Rendah  |
| 9. | 76 | 136 | 56 % | Tinggi |
| **Jumlah** | **679** | **1224** | **55 %** | **Rendah**  |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 1 sampai 9 (April 2014)

Berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan sebagaimana yang tampak pada tabel 18 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo berada dalam kategori rendah dengan persentase 55 %. Hal ini mengacu pada pedoman yang telah dipaparkan pada Bab III.

Dari data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa persetujuan atau penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan masih sangat minim, begitupun dalam hal ketakutan terhadap sanksi, dimana secara umum masyarakat tidak takut terhadap sanksi atas pelanggaran dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat, seperti masih banyak yang belum mendaftarkan objek pajaknya, masih banyak yang sering terlambat membayar pajak bahkan menunggak sampai beberapa tahun, dan tidak membayar denda keterlambatan.

Namun hal tersebut tentu ada penyebabnya, secara teoritis berdasarkan pendapat beberapa ahli sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan hukum adalah karena adanya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang tinggi cenderung kepatuhan hukumnya juga tinggi, begitupun sebaliknya, masyarakat yang pengetahuan hukumnya rendah atau kurang maka kemungkinan besar kepatuhan hukumnya juga kurang.

Untuk itu, berikut akan disajikan beberapa data mengenai pengetahuan hukum masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 19. Pengetahuan responden mengenai tata cara pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Tahu  | 3 | 4% |
| 2. | Tidak Tahu | 65 | 96 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 12, (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa sebanyak 3 dari 68 responden atau 4 % menjawab Tahu, sedangkan sebanyak 65 responden atau 96 % menjawab Tidak Tahu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat tidak mengetahui tata cara pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Selanjutnya menurut Bapak Baharuddin, S selaku Lurah Paria menyatakan bahwa:

Secara umum masyarakat Kelurahan Paria belum sepenuhnya tahu mengenai tata cara pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan, hal itu disebabkan oleh karena mereka sendiri tidak mau tahu dan tidak mau berusaha untuk mengetahui tata caranya, sehingga pihak petugas pajak yang terjun langsung ke masyarakat untuk mendata objek pajak yang dimiliki masyarakat. (Hasil Wawancara Tanggal 3 Februari 2014).

Dengan demikian berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Lurah Paria, dapat dikatakan bahwa masyarakat umumnya belum mengetahui tata cara pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan.

 Selanjutnya terkait masalah fungsi pajak, sebagaimana fungsi dari pajak, dapat dibedakan atas dua yaitu Fungsi *Budgter* (Fungsi Finansial), dan Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur). Adapun yang dimaksud kedua fungsi tersebut yaitu:

1. Fungsi *Budgeter* (Fungsi Finansial), fungsi pajak adalah suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang pada umumnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin .
2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur), fungsi pajak berarti bahwa pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi, dan banyak ditujukan pada sektor swasta.

Untuk melihat apakah masyarakat mengetahui fungsi dari pemungutan pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Pengetahuan responden tentang fungsi pajak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Tahu | 9 | 13 % |
| 2. | Tidak Tahu | 59 | 87 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 13, (April 2014)

 Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui sebanyak dari 68 responden terdapat 9 orang menjawab Tahu atau sebanyak 13 %, artinya mereka mengetahui fungsi dari pajak, sedangkan yang menjawab Tidak Tahu sebanyak 59 responden atau 87 %. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum tahu tentang fungsi dari pajak.

 Selanjutnya mengenai tenggang atau batas waktu pembayaran PBB setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa pajak yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Untuk mengetahui pengetahuan responden tentang hal ini, berikut akan dipaparkan datanya:

Tabel 21. Pengetahuan responden tentang tenggang/batas waktu pembayaran PBB setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Tahu  | 6 | 9 % |
| 2. | Tidak Tahu  | 62 | 91 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 14, (April 2014)

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat sebanyak 6 responden atau 9 % dari 68 responden menjawab Tahu, artinya mereka mengetahui tenggang/batas waktu pembayaran PBB, sedangkan yang menjawab Tidak Tahu sebanyak 62 responden atau 91 %, yang berarti mereka sama sekali tidak mengetahui. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kelurahan Paria secara umum tidak mengetahui mengenai tenggang waktu pembayaran PBB.

 Kemudian terkait masalah pengetahuan masyarakat tentang sanksi jika melanggar aturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 dan 25 yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut data selengkapnya:

Tabel 22. Pengetahuan responden tentang sanksi atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Tahu | 6 | 9 % |
| 2. | Tidak Tahu | 62 |  91 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 15, (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 68 responden yang menjawab Tahu sebanyak 6 responden atau 9 %, artinya mereka tahu akan sanksi tersebut, sedangkan yang menjawab Tidak Tahu sebanyak 62 responden atau 91 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat tidak mengetahui secara jelas akan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Lebih lanjut Bapak Baharuddin, S menyatakan bahwa:

Secara umum pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Paria terhadap isi Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan memang sangat kurang, hal ini terbukti dengan masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam hal pembayaran PBB dan masih banyak yang beranggapan bahwa tidak adanya imbalan yang dirasakan setelah membayar pajak. (Hasil Wawancara Tanggal 3 Februari 2014).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat pengetahuan hukum masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan, berikut akan dipaparkan tabel rata-rata nilai berdasarkan pembobotan opsi jawaban dari tiap item pertanyaan. Dimana jumlah item pertanyaan untuk mengukur tingkat pengetahuan hukum masyarakat sebanyak 4 pertanyaan, yang mana setiap item diberi skor tertinggi 2 dan skor terendah 1. Sedangkan jumlah responden sebanyak 68 orang. Dengan demikian skor tertinggi (skor ideal) untuk setiap item pertanyaan adalah sebanyak 68 x 2 = 136. Sehingga skor ideal secara keseluruhan adalah 4 x 136 = 544.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel 23 di bawah ini:

Tabel 23. Rata-rata nilai berdasarkan pembobotan opsi jawaban tiap item pertanyaan dalam angket tentang pengetahuan hukum masyarakat.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Angket** | **Skor (n)** | **Skor Ideal (N)** | **n: N x 100 %** | **Kategori** |
| 12. | 71 | 136 | 52 % | Rendah |
| 13. | 77 | 136 | 57 % | Tinggi  |
| 14. | 74 | 136 | 54 % | Rendah  |
| 15.  | 74 | 136 | 54 % | Rendah  |
| **Jumlah**  | **296** | **544** | **54 %** | **Rendah** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 12 sampai 15 (April 2014).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan hukum masyarakat berada dalam kategori rendah dengan persentase 54 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa rendahnya kepatuhan hukum masyarakat khususnya dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh rendahnya atau kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. **Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.**

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya menyatakan bahwa dalam hal meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, upaya yang paling utama untuk ditempuh adalah melalui penyuluhan dan penerangan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menerangkan tentang suatu aturan hukum tertentu kepada masyarakat agar mereka bisa tahu dan paham akan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut.

Tanpa adanya penyuluhan dan penerangan tentang suatu aturan hukum atau Undang-Undang, masyarakat tidak semuanya akan mengerti tentang hakekat dari adanya aturan hukum tersebut, hal ini dikarenakan karakteristik masyarakat berbeda-beda, ada yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi dikarenakan berpendidikan yang tinggi, dan tak sedikit juga masyarakat yang pemahamannya kurang karena pendidikannya rendah, dan akhirnya mereka tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mengetahui intensitas pemerintah dalam mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, berikut akan disajikan data dari responden:

Tabel 24. Tanggapan responden mengenai intensitas pemerintah dalam mengadakan penyuluhan hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Pernah | 0 | 0 % |
| 2. | Tidak Pernah | 68 | 100 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 16 (April 2014)

Dari tabel di atas terlihat mengenai intensitas pemerintah dalam mengadakan penyuluhan hukum tentang PBB, dimana dari 68 responden 100 % menjawab Tidak Pernah. Itu artinya di Kelurahan Paria tidak pernah diadakan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Selanjutnya untuk mengetahui intensitas masyarakat dalam mengikuti penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan, berikut akan disajikan tabelnya:

Tabel 25. Intensitas responden dalam mengikuti penyuluhan hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Pernah | 0 | 0 % |
| 2. | Tidak Pernah | 68 | 0 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 17 (April 2014)

Berdasarkan tabel mengenai intensitas penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana berdasarkan data responden menunjukkan tidak pernah diadakan penyuluhan hukum di Kelurahan Paria. Sehingga 100 % responden juga menjawab tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Baharuddin, S selaku pemerintah Kelurahan Paria bahwa:

Upaya yang selama ini kami lakukan, selalu rutin mengingatkan dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat mengenai waktu pembayaran PBB dan tanggal jatuh temponya, hal ini biasanya kami umumkan di mesjid usai shalat berjamaah, selain itu kami juga memberikan teguran langsung secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang menunggak hutang pajaknya, dan sejauh ini belum pernah dilakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat. (Hasil Wawancara Tanggal 3 Februari 2014).

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Paria, dimana ia memberikan pernyataan bahwa sejauh ini belum ada upaya konkrit yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar PBB, seperti dalam bentuk penyuluhan atau penerangan hukum bagi masyarakat, belum pernah sama sekali dilakukan. Pemerintah hanya sebatas mengingatkan masyarakat untuk senantiasa membayar hutang pajaknya, sementara upaya untuk lebih memperdalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak belum pernah diadakan.

Selanjutnya akan dipaparkan tabel mengenai intensitas pemerintah dalam mengingatkan akan waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 26. Tanggapan responden mengenai intensitas pemerintah dalam mengingatkan waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Pernah | 60 | 88 % |
| 3. | Tidak Pernah | 8 | 12 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 18 (April 2014)

Dari tabel di atas dapat dilihat jawaban responden mengenai intensitas pemerintah dalam mengingatkan masyarakat akan waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana dari 68 responden sebanyak 60 orang menjawab Pernah atau 88 %, kemudian yang menjawab Tidak Pernah sebanyak 8 responden atau 12 %,. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intensitas pemerintah dalam mengingatkan waktu pembayaran PBB kepada masyarakat tergolong tinggi.

Lebih lanjut Bapak Andi Usman selaku penagih pajak Lingkungan Tengnga menyatakan bahwa:

Pemerintah tidak pernah mengadakan penyuluhan tentang PBB untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga kepatuhan masyarakat juga kurang karena kurangnya pemahaman mengenai hakekat pemungutan pajak, pemerintah sejauh ini hanya sebatas memberikan peringatan kepada masyarakat untuk sesegera mungkin membayar hutang pajaknya sebelum jatuh tempo. (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2014).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Drs. Nuralang bahwa belum ada upaya yang ditempuh oleh pemerintah Kelurahan Paria untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat membayar PBB. (Hasil Wawancara Tanggal 5 Februari 2014).

Dari hasil wawancara dengan kedua penagih pajak di atas, dimana mereka memberikan pernyataan yang sama mengenai upaya yang pemerintah lakukan guna meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat. Dimana dikatakan bahwa upaya yang selama ini pemerintah lakukan hanya berupa peringatan kepada masyarakat, tidak pernah diadakan kegiatan penyuluhan yang semestinya dilakukan sebagai salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.

Selain dari penyuluhan, salah satu upaya yang bisa meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat adalah memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dengan pemberian sanksi, masyarakat akan merasa takut untuk melakukan pelanggaran, dan hal ini menjadi tugas pemerintah agar bersikap tegas kepada pihak yang tidak patuh membayar pajak. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemberian sanksi oleh pemerintah kepada pihak yang tidak patuh terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan, berikut akan dipaparkan tabelnya:

Tabel 27. Tanggapan responden mengenai pemberian sanksi oleh pemerintah kepada pihak yang tidak patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kategori Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
| 1. | Sudah  | 7 | 10 % |
| 2. | Belum  | 61 | 90 % |
| **Jumlah** | **68** | **100 %** |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 19 (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden mengenai pemberian sanksi oleh pemerintah kepada pihak yang tidak patuh membayar PBB, dimana dari 68 responden sebanyak 7 orang atau 10 % menjawab Sudah, sedangkan 61 responden atau 90 % menjawab Belum. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden mengatakan pemerintah belum memberikan sanksi kepada pihak yang tidak patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin, S mengenai hal ini, maka ia memberikan pernyataan sebagai berikut:

Kami tidak bertindak keras kepada masyarakat untuk masalah pembayaran PBB, karena kapan masyarakat dikerasi maka yakin mereka bukan berubah menjadi lebih patuh tetapi malah sebaliknya, begitulah karakter masyarakat saat ini. Oleh karena itu kami berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan, memberikan peringatan dengan cara yang halus yang tidak membuat masyarakat tersinggung. (Hasil Wawancara Tanggal 3 Februari 2014).

Lebih lanjut Bapak Drs. Nuralang menyatakan bahwa:

Pemerintah kurang tegas dalam hal pemberian sanksi kepada masyarakat, mungkin karena hal inilah masyarakat kurang patuh terhadap aturan tentang PBB, padahal seandainya sanksi diberikan dengan tegas tanpa pandang bulu, besar kemungkinan masyarakat akan lebih segan dan takut untuk melanggar. Seperti dalam persoalan PBB, menurut saya jika memang kita ingin melihat masyarakat semuanya patuh, maka apabila ada masyarakat yang tidak membayar PBB atau menunggak dalam waktu yang cukup lama langsung saja dilakukan penyitaan lahan, saya rasa jika hal ini bisa diterapkan oleh pemerintah maka besar kemungkinan masyarakat akan lebih patuh untuk membayar PBB, itu salah satu contoh tindakan yang bisa dilakukan menurut saya. (Hasil Wawancara Tanggal 5 Februari 2014).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kurang patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah karena kurang tegasnya pemerintah dalam menindaklanjuti pihak-pihak yang lalai dalam pajak. Dimana pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat, sehingga mereka tidak memiliki rasa takut dan akhirnya selalu terlambat bahkan sampai ada yang tidak membayar pajaknya.

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo adalah hanya sebatas rutin mengingatkan masyarakat untuk segera membayar hutang pajaknya serta memberikan teguran langsung secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang menunggak hutang pajaknya. Sejauh ini pemerintah tidak pernah menjatuhkan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak patuh, dan juga belum pernah diadakan penyuluhan hukum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berada dalam kategori rendah dengan persentase 55 %, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah hanya sebatas rutin mengingatkan masyarakat untuk segera membayar hutang pajaknya serta memberikan teguran langsung secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang menunggak hutang pajaknya. Sejauh ini pemerintah tidak pernah menjatuhkan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak patuh, dan juga belum pernah diadakan penyuluhan hukum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.
3. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Kelurahan Paria semestinya lebih meningkatkan kepatuhan hukumnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka akan hakekat dari pemungutan pajak sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat.
2. Pemerintah seharusnya melakukan beberapa upaya khusus dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tidak hanya sebatas memberikan peringatan atau teguran kepada masyarakat semata, tetapi harus lebih aktif melakukan hal-hal yang bisa efektif dalam meningkatkan kepatuhan mereka, seperti dengan mengadakan penyuluhan hukum atau penerangan hukum kepada masyarakat terkait masalah aturan tentang pajak, agar masyarakat lebih tahu dan paham tentang hakekat dari pemungutan pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Pemerintah juga harus bersikap lebih tegas kepada masyarakat yang lalai atau tidak patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu, karena apabila pemerintah tidak tegas maka masyarakat akan bersikap semaunya saja dan tidak mematuhi aturan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku:**

Anas Sudiyono. 2003. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta

B.Boediono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media. Jakarta.

Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak.* Rajawali Pers. Jakarta.

Djoko Muliono. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Paraktis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Erly Suandi. 2002. *Perpajakan.* Salemba Empat. Jakarta.

Eugenia Liliawati Muljono. 1999. *Tanya Jawab Pajak Bumi dan Bangunan*. Harvarindo. Jakarta.

Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Murai Kencana. Jakarta.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Penelitian Sosial.* Bumi Aksara. Jakarta.

Moehar Daniel. 2003*. Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta.

Mohammad Zain dan Suryo Hermana. 2010. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2010.* Indeks. Jakarta.

Mohammad Zain. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.

R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.

St. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2006. Pokok*-Pokok Hukum Administrasi Negara.* Liberty. Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto. 2003. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sukardi. 2003. *Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Syamsul Bakhri. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. UniversitasNegeri Makassar. Makassar.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2010. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

**Skripsi**

Rahman. 2005. *Kesadaran Hukum Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai* . FEIS UNM. Makassar

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

**Internet:**

<http://www.kantorhukum-lhs.com>. *Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum* oleh Drs. M. Sofyan Lubis, SH.

[http://jdih.jatimprov.go.id.*menanamkan*](http://jdih.jatimprov.go.id.menanamkan) *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*.

1. <http://www.kantorhukum-lhs.com>. *Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum* oleh Drs. M. Sofyan Lubis, SH. Diakses 2 Januari 2014. [↑](#footnote-ref-2)
2. [http://jdih.jatimprov.go.id.*menanamkan*](http://jdih.jatimprov.go.id.menanamkan) *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Diakses 2 Januari 2014. [↑](#footnote-ref-3)
3. Satjipto Rahardjo. 2010.*Sosiologi Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm.203 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid. Hlm. 207 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid. Hlm. 209 [↑](#footnote-ref-6)
6. R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 65 [↑](#footnote-ref-7)
7. Zainuddin Ali. 2010. *Sosiologi Hukum.* Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 68 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid. Hlm. 69 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. Hlm. 69 [↑](#footnote-ref-10)
10. Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta. Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid. Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-12)
12. H. Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 24 [↑](#footnote-ref-13)
13. Djoko Muljono. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Penerbit Andi. Yogyakarta. Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-14)
14. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta. Hlm. 6 [↑](#footnote-ref-15)
15. B. Boediono. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media. Jakarta. Hlm. 23 [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid. Hlm. 25 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid. Hlm. 26 [↑](#footnote-ref-18)
18. St. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yoyakarta. Hlm. 135 [↑](#footnote-ref-19)
19. Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. Op. Cit. Hlm. 8 [↑](#footnote-ref-20)
20. Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Murai Kencana. Jakarta. Hlm. 6 [↑](#footnote-ref-21)
21. H. Bohari. Op. Cit. Hlm. 41 [↑](#footnote-ref-22)
22. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. Op. Cit. Hlm. 15 [↑](#footnote-ref-23)
23. Fidel. Op. Cit. Hlm. 11 [↑](#footnote-ref-24)
24. B. Boediono. Op. Cit. Hlm. 497 [↑](#footnote-ref-25)
25. Eugenia Liliawati Muljono. 1999*. Tanya Jawab Pajak Bumi dan Bangunan*. Harvarindo. Jakarta. Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-26)
26. Erly Suandy. 2002. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta. Hlm. 350 [↑](#footnote-ref-27)
27. Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. Op. Cit. Hlm. 74 [↑](#footnote-ref-28)
28. H. Bohari. Op. Cit. Hlm 98 [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid. Hlm 99 [↑](#footnote-ref-30)
30. Suharsimi Arikunto. 2010. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 17 [↑](#footnote-ref-31)
31. Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 53 [↑](#footnote-ref-32)
32. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 44 [↑](#footnote-ref-33)
33. Suharsimi Arikunto. Op. Cit. Hlm. 131 [↑](#footnote-ref-34)
34. Moehar Daniel. 2003. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 135 [↑](#footnote-ref-35)
35. Sukardi. Op. Cit. Hlm. 81 [↑](#footnote-ref-36)
36. Anas Sudiyono. 2003. *Pengantar Statistik Pendidikan* . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 40 [↑](#footnote-ref-37)
37. Rahman. 2005. *Kesadaran Hukum Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai* . FEIS UNM. Makassar. Hlm. 36 [↑](#footnote-ref-38)